





Wilayah Pantai Timur Surabaya ditetapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sebagai Kawasan Konservasi atau Kawasan Lindung yang ditetapkan sesuai peraturan daerah Kota Surabaya No 3 Tahun 2007, tentang kawasan konservasi Pamurbaya seluas 2.500 hektare, serta Perda Kota Surabaya No. 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034. Suatu wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi, akan ada suatu pembatasan dalam pemanfaatan ruangnya, tidak diperbolehkan suatu kawasan konservasi didirikan bangunan permanen, artinya kegiatan yang dilakukan didalam kawasan konservasi harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekosistem didalamnya. Kedua Perda tersebut dibuat dengan pertimbangan untuk ewujudkan pembangunan Kota Surabaya yang berkelanjutan, yang penataan ruang wilayahnya secara serasi, selaras, dan seimbang.

Arahan penataan ruang wilayah yang berkelanjutan ini dapat terwujud jika didukung keterpaduan pembangunan antar sektor dan antar pelaku. Salah satu upaya untuk mengurangi terjadinya persoalan lingkungan yang terkait dengan sumber daya alam adalah melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif dan kritis terhadap lingkungan. Tentunya dalam persoalan ini tidaklah mungkin dilakukan sendiri oleh pemerintah, sudah tentu harus melibatkan komponen - komponen masyarakat lainnya. Salah satu adalah keterlibatan LSM (lembaga swadaya Masyarakat) dalam proses penguatan masyarakat sipil dengan pendekatan Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam konteks ini peran Gerakan LSM Nol Sampah sebagai organisasi gerakan sosial dapat dikategorikan dalam beberapa aksi didalam melakukan

perlindungan Pantai Timur Surabaya, gerakan yang ditunjukkan oleh LSM Nol Sampah diantaranya yaitu: 1) Penguatan dan pemberdayaan kelompok tani lokal Truno Djoyo yang dilakukan melalui penanaman, pembibitan dan pengawasan mangrove, 2) advokasi, yang ditunjukkan melalui komunikasi dengan anggota dewan terkait penyelamatan ekosistem mangrove yang ada 3) membangun opini publik melalui jaringan media massa.

Proses pembedaan (*Framing*) yang dipilih oleh LSM Nol Sampah dilakukan melalui media cetak seperti harian surya, sedangkan media online terkait pemberitaan di media yang saat ini gencar dilakukan terkait Pantai Timur Surabaya yang bisa diakses di media online antara lain: Antaratim.com, Tribunnews.com, dan Kompas.com hal ini dilakukan dalam memberikan informasi secara cepat dan langsung kepada publik sehingga tidak perlu menunggu penerbitan seperti yang dilakukan oleh surat kabar yakni Harian Surya dan Kompas. Dua berita media cetak dan online tersebut dipilih sebagai strategi gerakan LSM Nol Sampah dalam melakukan pergerakannya.

Selain itu LSM Nol Sampah dalam memobilisasi massa dilakukan dengan memanfaatkan media sosial seperti pembuatan akun facebook, blogger, dan twitter dalam mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan, terkadang mereka juga mengajak LSM lingkungan lainnya, serta masyarakat untuk bergabung dalam melakukan pelestarian mangrove di Pantai Timur Surabaya. *Social network* yang terbangun dalam mensosialisasikan pelestarian lingkungan dapat tersampaikan kepada para partisipannya. Selain itu juga, LSM Nol Sampah membangun komunikasi seperti surat menyurat secara



























belum selesai dan berhenti, akan tetapi masih terus berlanjut dan berkembang dari waktu ke waktu, seiring dengan perkembangan kasus yang terjadi. Kegiatan advokasi serta diskusi dengan berbagai pihak terus dilakukan oleh LSM Nol Sampah, karena bagaimanapun dengan adanya kritik akan mampu menjadi sarana evaluasi terhadap hasil kerja lembaga maupun Pemerintah Kota Surabaya.

### 3. Jaringan media massa

Kegiatan yang dilakukan oleh LSM Nol Sampah dalam melakukan perlindungan Pantai Timur Surabaya dilakukan diberbagai media. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara luas terkait permasalahan yang ada di kawasan konservasi Pamurbaya. Tuntutan yang saat ini gencar dilakukan oleh Nol Sampah di berbagai media yakni permasalahan pembangunan yang semakin marak dilakukan oleh berbagai kalangan baik dari pihak pengembang maupun masyarakat setempat mengingat kawasan tersebut sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi namun Pemerintah dalam hal ini Pemerintahan Kota Surabaya dinilai lemah dalam hal melakukan kontrol terhadap kawasan konservasi Pantai Timur Surabaya.

Seperti yang dimuat di [Antarajatim.com](http://Antarajatim.com) pada 27 Maret 2017 dan [Harian Surya](http://HarianSurya.com) edisi 29 maret 2017, Hermawan Some selaku ketua LSM Nol Sampah mengatakan menyesalkan rencana penebangan pohon mangrove di kawasan konservasi Pantai Timur Surabaya tepatnya di Sungai Avour Wonerejo Rungkut Kota Surabaya untuk proyek Bronjong Batu. LSM Nol

Sampah juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Surabaya harus melakukan kajian yang lebih mendalam sesuai dengan Perda Nomer 12 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya.

Kemudian pemberitaan mengenai LSM Nol Sampah dalam menjaga Pantai Timur Surabaya dapat dilihat di Kompas.com pada 22 februari 2015. Hermawan Some selaku ketua LSM Nol Sampah menilai bahwa ekowisata mangrove harus sesuai dengan prinsip konservasi. Pengunjung ekowisata harus memiliki rasa cinta terhadap lingkungan. LSM Nol Sampah mengaku selama ini mengamankan Pamurbaya setiap bulannya dengan mengajak masyarakat untuk membersihkan kawasan hutan mangrove dari sampah.

Selain itu pemberitaan mengenai pengembangan perumahan yang terjadi di 2015 dimuat di Jatintimes.com pada 16 september 2015. LSM Nol Sampah menyatakan berdasarkan hasil *Hearing* di komisi A DPRD Kota Surabaya yang dihadiri oleh Bappeko, Dinas PU Cipta Karya, Dinas Pertanian, BLH, Satpol PP, dan Nol Sampah Surabaya. kegiatan yang dilakukan oleh pengembang belum dilengkapi ijin mendirikan bangunan dari pemerintah Kota Surabaya. Pengembang hanya memiliki izin pemakian lahan sempadan sungai dari Dinas Pengairan Kota Surabaya. Berdasarkan kegiatan tersebut LSM Nol Sampah menyurati Wali Kota Surabaya untuk mengkaji lebih mendalam.

Strategi yang coba dibangun oleh LSM Nol Sampah melalui jaringan media massa merupakan jalan tengah yang diambil oleh LSM Nol Sampah dalam melakukan pergerakannya. Dengan melakukan kampanye di media



lebih serius dalam melakukan penyelamatan Pamurbaya. Jaringan media cetak maupun online digunakan untuk memobilisasi massa untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada, maka masyarakat harus memiliki rasa saling peduli dan saling memiliki dalam pelestarian lingkungan disekitarnya.

Dari paparan di atas, peneliti mendapatkan beberapa data dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, dapat dijelaskan bahwa salah satu upaya untuk mengurangi terjadinya persoalan lingkungan yang terkait dengan sumberdaya alam adalah melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan LSM Nol Sampah sebagai penguatan kelompok masyarakat untuk lebih peduli dengan lingkungan karena masyarakat merupakan komponen utama dalam melestarikan sumber daya alam.

Jaringan formal dan informal yang dimiliki oleh LSM Nol Sampah dalam menjaga dan menyelamatkan ekosistem mangrove di Pamurbaya telah dilakukan secara optimal, meskipun belum sesuai harapan. Dalam upaya perlindungan kawasan konservasi LSM Nol Sampah melibatkan *Stakeholder* yang ada yakni: masyarakat, pemerintah, dan pelaku bisnis. Permasalahan yang terjadi di Pantai Timur Surabaya harus segera diselesaikan, mengingat kawasan ini penting untuk dijaga keberlangsungannya.

Membentuk opini publik melalui jaringan media merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan oleh gerakan lingkungan yang menitikberatkan kepada basis masyarakat. Jaringan media membantu dalam memberikan sebuah permasalahan atau isu-isu yang sedang berkembang. Strategi ini dilakukan oleh LSM Nol Sampah dengan mengkontak media dalam menjalankan gerakannya. Jaringan media yang digunakan oleh LSM Nol Sampah antara lain: media cetak (Harian Surya). Kemudian media online yang digunakan (Antarajatim.com, Jatimtimes.com, Tribunnews.com). Kedua media tersebut digunakan dalam memberikan informasi kepada publik.

Maka dari itu peneliti akan memaparkan data diatas dengan menggunakan pendekatan teori *Civil Society* dan pendekatan selanjutnya peneliti menggunakan Konsep Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement*) untuk memudahkan peneliti di dalam melihat strategi gerakan LSM Nol Sampah.

Untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LSM Nol Sampah, maka akan digunakan pendekatan yang pertama yakni teori *Civil Society*, tentang jenis-jenis partisipasi masyarakat menurut Muhammad As Hikam yang sekaligus peneliti analisa dengan data dari hasil wawancara di atas:

#### 1. Kemandirian individu dan kelompok

Adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok dalam masyarakat, terutama saat berhadapan dengan negara.











suatu pergerakan sosial. Identitas kolektif yang melekat pada anggota dari organisasi gerakan sosial baru dapat dilihat dari tiga identitas yang melekat pada anggota tersebut, yang terdiri dari identitas aktivis, identitas organisasi dan identitas taktik. Budaya gerakan sosial baru erat kaitannya dengan konsep pembingkaihan (*Framing*). Konsep *frame* tentu saja berperan dan menjadi faktor yang menentukan dalam partisipasi gerakan sosial.

Dalam hal ini, acuan yang digunakan menggunakan strategi digunakan dalam menjalankan aksi gerakan sosial, dalam hal ini menggunakan pendapat Johnston dan Klandermans tentang identitas kolektif yang kemudian dianalisis melalui hasil wawancara diatas:

- 1) Identitas kolektif sebagai proses yang melibatkan definisi kognitif tentang tujuan, sarana, dan bidang tindakan. Berdasarkan hasil wawancara diatas maka strategi gerakan LSM Nol Sampah dalam melakukan perlindungan Pantai Timur Surabaya menggunakan jaringan media massa yang merupakan strategi yang telah dipilih untuk memobilisasi masyarakat terkait kerusakan lingkungan, kemudian strategi yang dilakukan oleh LSM Nol Sampah terkait jaringan media massa adalah membagi identitas kolektif mengenai masalah lingkungan yang telah diperjuangkannya.

Aksi kolektif LSM Nol Sampah dalam hal ini mengarah pada gerakan sosial dimana aksi mereka bertujuan untuk melakukan perubahan sosial. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan kelompok masyarakat dalam hal ini kelompok tani Truno Djoyo dimana mereka terdiri atas sekelompok orang yang berupaya melakukan perubahan sosial untuk memajukan

kondisi lingkungan di sekitar mereka yaitu terhadap upaya perubahan kultur masyarakat agar lebih menjaga keberlangsungan ekosistem mangrove yang ada di Pantai Timur Surabaya.

- 2) Jaringan relasi aktif antara *actor* yang berinteraksi, berkomunikasi, saling mempengaruhi, negosiasi, dan membuat keputusan. Bentuk organisasi dan model kepemimpinan, saluran komunikasi, dan teknologi komunikasi adalah merupakan bagian dari jaringan relasi.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa LSM Nol Sampah berjejaring relawan dari masyarakat umum, tidak hanya masyarakat LSM Nol Sampah memiliki jaringan dengan media yang cukup kuat. Komunikasi yang dilakukan dengan anggota dewan merupakan jaringan yang dimiliki oleh LSM Nol Sampah dalam melakukan gerakan penyelamatan ekosistem mangrove di Pantai Timur Surabaya.

- 3) Hubungan yang dimiliki kelompok yang memungkinkan individu merasakan seperti sebagai bagian dari suatu kesatuan. Jika dilihat dari penjabaran hasil wawancara diatas LSM Nol Sampah memiliki hubungan yang kuat dengan masyarakat dalam hal ini diwakili oleh kelompok tani Truno Djoyo yang dimulai sejak tahun 2012. Penguatan dan pemberdayaan yang dilakukan merupakan strategi dari LSM Nol Sampah dalam mengubah perilaku masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya.

Strategi Gerakan Sosial selanjutnya menyebut pentingnya proses *framing* dalam memahami sukses tidaknya sebuah gerakan sosial. Skema mengenai pembingkaiian (*framing*) yang digunakan untuk mendiagnosis suatu kondisi sosial yang bermasalah untuk dipecahkan, menawarkan jalan keluar, dan menawarkan alasan pembenaran untuk memotivasi dukungan bagi aksi kolektif. Snow menambahkan bahwa proses *framing collective action frames* adalah skema interpretasi yang merupakan sekumpulan *belifes and meaning*, berorientasi pada aksi yang menginspirasi dan melegitimasi aktivitas sebuah organisasi gerakan sosial.

Gerakan sosial lingkungan LSM Nol Sampah merupakan lembaga atau komunitas yang masuk kedalam konsep Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement*) dikarenakan LSM Nol Sampah mempunyai orientasi gerakan yang kosen terhadap lingkungan. Gerakan LSM Nol Sampah memiliki hubungan konfliktual dengan kaum pebisnis dan pemerintah, Gerakan LSM Nol Sampah Surabaya dalam memperjuangkan kawasan konservasi hutan mangrove memiliki hubungan konfliktual merupakan salah satu strategi untuk dapat mempertahankan gerakan. Hal ini dikarenakan hubungan konflik yang jelas dapat membantu gerakan LSM LSM Nol Sampah dalam identifikasi identitas kolektif yang dibagi melalui media massa.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa strategi gerakan LSM Nol Sampah mempunyai gambaran dan orientasi yang jelas dalam mempertahankan gerakan lingkungan terkait perlindungan kawasan





		kuat dengan para jurnalis atau media yang memiliki peran yang sangat penting dalam memobilisasi masyarakat luar dengan aksi yang mereka jalani.
2	Advokasi	Proses ini dilakukan oleh LSM Nol Sampah dengan melakukan diskusi dan komunikasi langsung dengan Anggota Dewan. Proses ini dilakukan sebagai kontrol terhadap kekuatan pelaku bisnis dalam pengembangan perumahan. Advokasi dilakukan karena pembangunan perumahan yang terjadi didalam peta kawasan konservasi, pembangunan perumahan Semanggi dinilai menyalahi aturan yang dibuat oleh pemkot terkait IMB bangunan permanen
3	Jaringan media massa	Gerakan LSM Nol Sampah dalam memperjuangkan kawasan konservasi hutan mangrove di Pantai Timur Surabaya terkait kerusakan mangrove yang berada di wonorejo yang masuk kedalam kawasan konservasi Pantai Timur Surabaya akibat pendirian bangunan liar yang mengancam keberlangsungan ekosistem dikawasan Konservasi tersebut. Langkah yang dilakukan dalam hal ini dengan cara membentuk opini publik melalui peran media baik berupa media cetak maupun















Dari penjabaran diatas selanjutnya, Strategi gerakan untuk melakukan perlindungan Pantai Timur Surabaya dalam hal ini upaya dalam menyelamatkan hutan mangrove akan dibahas melalui teori politik hijau. Strategi Gerakan dari Organisasi Lingkungan baik yang berupa partai politik, LSM ataupun Gerakan sosial dalam seluruh tingkatan telah menjadi salah satu fokus dari para pemikir hijau.

Jika dianalisis menggunakan teori politik hijau menurut Andrew Dobson, yang menyatakan pendapatnya menolak pandangan *antroposentrisme* dan perlu adanya batasan pertumbuhan, yang merupakan penyebab munculnya krisis lingkungan secara alami. Pandangan Politik Hijau ini merupakan pengalaman dari pertumbuhan ekonomi secara *eksploitasi* yang merupakan penyebab dari kerusakan lingkungan yang ada sekarang ini. Cara pandang *antroposentris* ini menyebabkan manusia mengeksploitasi dan menguras sumber daya alam dengan sebesar-besarnya demi kelangsungan hidupnya.

Tindakan yang dilakukan oleh gerakan sosial lingkungan LSM Nol Sampah melalui saluran politik formal dan nonformal seperti diskusi maupun pertemuan langsung dengan anggota legislatif dan badan eksekutif, memberikan surat resmi, serta melakukan lobi berguna untuk dapat mencapai tujuan daripada gerakan lingkungan yang diperjuangkannya. Salah satu kendala yang dialami dalam saluran politik ini adalah ketika bentuk partisipasinya itu dilangkahi dengan lobi dibelakang oleh para elite pembuat kebijakan. Tantangan terbesar inilah yang menjadi tantangan terbesar gerakan lingkungan LSM Nol Sampah, pasalnya pelaku bisnis menghalalkan segala

cara untuk kepentingan ekonomi dan mengabaikan nilai-nilai ekologis dari alam itu sendiri.

Hukum mengenai lingkungan seringkali lemah dan bahkan tidak dapat dipaksakan. Sebagai hasilnya, strategi LSM Nol Sampah didalam melakukan gerakannya mengarah kepada masyarakat yang dilakukannya dengan cara mengorganisasi kelompok masyarakat. selain itu gerakan LSM Nol Sampah membangun opini publik melalui media massa yang digunakan sebagai taktik untuk mengirimkan pesan pada Pemerintahan. Hal ini membuat LSM Nol Sampah dapat disebut dengan kelompok anti-Pemerintah. Strategi dan tindakan kolektif yang di terapkan oleh LSM Nol Sampah yang memiliki perhatian terhadap mangrove di Pantai Timur Surabaya mencakup ketiga stakeholder, yakni masyarakat, pemerintah dan pebisnis dikarenakan kawasan tersebut dinilai sangat strategis.

Inti dari pemahaman kelompok lingkungan adalah menantang norma dan praktek ideologi dominan yaitu kapitalisme ekonomi dan asumsi dasar bahwasanya pertumbuhan ekonomi secara *eksploitasi* yang merupakan penyebab dari kerusakan lingkungan. Dalam hal ini gerakan yang dilakukan oleh LSM Nol Sampah yakni menantang kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan hukum ekologis. Beberapa permasalahan sudah menunjukkan bahwa para pebisnis yang melihat tinggi nilai kawasan yang berada didaerah pesisir sehingga seringkali melakukan kerusakan, contohnya adalah kasus bangunan illegal di pesisir yang merusak mangrove yang ada dikawasan konservasi Pantai Timur Surabaya.

Pelaksanaan dari strategi LSM Nol Sampah, termasuk berbagai macam kegiatan yang telah disebutkan di atas secara keseluruhan memang sudah dilakukan, meskipun belum mencapai hasil yang maksimal. Pelaksanaan strategi tersebut bersifat kontinuitas, dalam arti akan terus berlanjut dan berkembang. Salah satu hal yang perlu dilakukan secepatnya oleh pemerintah adalah bagaimana membuat kebijakan dan membuat sistem hukum yang berpihak kepada keberlangsungan ekosistem sumber daya alam pesisir Pantai Timur Surabaya dan lebih mengedepankan perlindungan terhadap kawasan konservasi.

Tindakan pengawasan menjadi sesuatu yang sangat penting (*urgent*) untuk dilakukan. Usaha dan tindakan pemerintah tentunya akan sia-sia jika saja unsur/pihak lain tidak memberikan dukungan. Kewajiban ada di tangan pemerintah akan tetapi tanggungjawab berada di tangan semua komponen masyarakat. Hal ini lebih menekankan lagi kepada pemerintah dalam pembebasan lahan di kawasan tersebut, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal batas-batas daerah konservasi secara jelas.